

Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan Terhadap Usahatani Kopi Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

¹ Siti Nur Aini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (UNEJ), Indonesia

² Herman Cahyo Diartho, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (UNEJ), Indonesia

³ Regina Niken Wilantari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (UNEJ), Indonesia

⁴ Riniati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (UNEJ), Indonesia

Informasi Naskah

Submitted: 25 Januari 2021

Revision: 20 Februari 2021

Accepted: 26 Februari 2021

Kata Kunci:

Kelembagaan Usahatani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, usahatani kopi, Biaya Transaksi.

Abstract

Increasing pressures on the livelihood needs of forest village communities so that utilization of forest resources is also increasing which leads to the destruction of existing forest resources, therefore the government through Perhutani issued a policy to maintain forest sustainability and issued a Community Forest Management Program (PHBM) is forest management system carried out jointly with the sharing of results between Perhutani and forest village communities and interested parties to achieve common interests so that the sustainability of forest functions and the benefits of forest resources can be obtained optimally. To be able to implement the rights and obligations of Community Forest Management (PHBM) the forest village community formed a community organization called the Forest Village Community Institution (LMDH) whose members were required to be a community residing in the village of Curahkalong. Forest management under stands will have an impact on the area which is caused is a reduction in labor unemployment and increase income for forest village communities who use the land under stands for coffee farming in the Curahkalong Village, Bangsalsari District, Jember Regency.

Abstrak

Semakin meningkatnya tekanan kebutuhan hidup masyarakat desa hutan sehingga pemanfaatan terhadap sumber daya hutan juga semakin meningkat yang mengarahkan kepada kerusakan sumber daya hutan yang ada, maka dari itu pemerintah melalui perhutani mengeluarkan kebijakan untuk menjaga kelestarian hutan dan mengeluarkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah sistem pengelolaan hutan yang dilakukan bersama dengan berbagi hasil antara perhutani dan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan untuk mencapai kepentingan bersama sehingga keberlanjutan fungsi hutan dan manfaat sumber daya hutan dapat diperoleh secara optimal. Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) masyarakat desa hutan membentuk sebuah lembaga masyarakat yang disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang anggotanya diharuskan masyarakat yang berdomisili di Desa Curahkalong. Pengelolaan hutan dibawah tegakan akan menimbulkan dampak pada wilayahnya yang ditimbulkan adalah pengurangan pengangguran tenaga kerja dan menambah penghasilan bagi masyarakat desa hutan yang memanfaatkan lahan dibawah tegakan untuk usahatani kopi di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

* Corresponding Author.

Siti Nur Aini, e-mail: nurainisiti439@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Sebenarnya negara ini diuntungkan karena dikaruniai kondisi alam yang mendukung, hamparan lahan yang luas, keragaman hayati yang melimpah, serta beriklim tropis dimana sinar matahari terjadi sepanjang tahun sehingga bisa menanam sepanjang tahun. Realita sumberdaya alam seperti ini sewajarnya mampu membangkitkan Indonesia menjadi negara yang makmur, tercukupi kebutuhan pangan seluruh warganya. Meskipun belum terpenuhi, pertanian menjadi salah satu sektor riil yang memiliki peran sangat nyata dalam membantu penghasilan devisa negara.

Penggunaan lahan di Kabupaten Jember Sebagian besar merupakan kawasan hijau ,terdiri dari hutan,sawah,tegal dan perkebunan.Wilayah kabupaten Jember(9,68%) berada pada wilayah datar sehingga daerah ini baik untuk pemukiman atau perkampungan. Selanjutnya wilayah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam (36,75%) menempati wilayah tersebut harus dihindarkan sehingga dapat berfungsi sebagai perlindungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sebagian besar wilayah di kabupaten jember adalah hutan dan mayoritas masyarakat di kabupaten jember menggantungkan hidup pada sumber daya hutan.hutan sangatlah berperan penting bagi perekonomian masyarakat kabupaten jember.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan, bagaimana pendapatan sebelum dan sesudah adanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan serta biaya transaksi yang terjadi di Lembaga Masyarakat Desa Hutan di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalasari Kabupaten Jember.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian (moleong,2010). Pada penelitian ini aturan main apa yang berlaku

(LMDH) dengan petani kopi dan kesejahteraan petani kopi sebelum dan sesudah adanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalasari Kabupaten Jember .

Analisis Data

Karakteristik Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Awal terbentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan Argopuro lestari dinisiasikan oleh Perhutani guna memanfaatkan sumberdaya hutan bersama masyarakat dengan sistem PHBM. Lembaga Masyarakat Desa Hutan Argopuro Lestari yang berada di Dusun Sumber Klopo Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalasari Kabupaten Jember. Lembaga Masyarakat Desa Hutan Argopuro Lestari ini di berdiri pada tanggal 03 April 2006 dan di kukuhkan dengan Akta Notaris No.9/tgl.03april.

Pendapatan Petani Kopi Sebelum dan Sesudah menjadi anggota LMDH. Hal ini berarti bahwa pendapatan petani kopi yang tidak bergabung dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan petani yang bergabung dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Hal ini dikarenakan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan membayar sewa lahan yang biayanya tinggi dan penggunaan biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja lebih besar yang berimplikasi terhadap rendahnya pendapatan petani. Rendahnya pendapatan petani sebelum bergabung dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Dapat di buktikan dengan tenaga kerja yang digunakan petani sebelum bergabung Lembaga Masyarakat Desa Hutan berkisar 30-95 Hari orang kerja (HOK) yang lebih besar dari tenaga kerja yang digunakan oleh petani mitra dan 20-56 Hari orang kerja (HOK). Dengan adanya sistem bagi hasil dari Perhutani juga mampu menghasilkan pendapatan yang relative lebih tinggi.

Analisis Biaya Transaksi

Total biaya transaksi yang dikeluarkan untuk kelembagaan dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat PHBM di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Argopuro Lestari meliputi : (1) biaya *setting* atau biaya yang dikeluarkan untuk pembentukan lembaga , (2) biaya informasi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi pendukung program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Biaya informasi ini disampaikan pada saat pertemuan dengan anggota maupun instansi terkait , (3) biaya operasional yaitu biaya yang meliputi biaya pertemuan rutin dengan anggota.

PEMBAHASAN

Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Peran Kelembagaan pengelolaan kopi Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember juga melibatkan banyak pihak yaitu perhutani sebagai penyedia lahan , Lembaga Masyarakat Desa Hutan sebagai lembaga bentukan masyarakat desa hutan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, petani sebagai pengelola lahan yang mengelola kopi dan hasilnya akan di bagi hasil. Besarnya sharing yang terjadi di lapangan yaitu 20% untuk Perhutani , 70% untuk petani dan 5% untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Pola kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan Argopuro Lestari dengan Perhutani adalah dalam bentuk kegiatan pemanfaatan lahan dibawah tegakan sebagai lahan kawasan hutan produksi untuk masyarakat desa hutan. Dalam proses kerjasama antara Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Argopuro Lestari dapat membantu Perhutani dalam peningkatan kawasan hutan dan pendapatan bagi masyarakat semakin meningkat. Pelaksanaan program dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan Argopuro Lestari yang melibatkan masyarakat desa hutan memiliki dampak sosial yaitu dengan menyerap tenaga kerja serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan yang di laksanakan Perhutani guna tercapainya fungsi hutan.

Perbandingan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Menjadi Anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Berdasarkan analisis tentang perbedaan pendapatan petani kopi sebelum dan sesudah menjadi anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan dapat diketahui bahwa pendapatan petani kopi sebelum dan sesudah menjadi kopu sangat berbeda. Pendapatan kopi yang tergabung dalam anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan petani kopi yang sebelum bergabung dengan LMDH. Untuk mengetahui pendapatan petani sebelum dan sesudah menjadi anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan, per hektar dan dari hasil analisis pendapatan petani sebelum dan sesudah menjadi anggota benar-benar berbeda. Perbedaan tersebut merupakan dampak dari adanya

hasil panen yang diperoleh petani sebelum dan sesudah menjadi anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Rata-rata perolehan hasil panen petani sebelum dan sesudah menjadi anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam per hektar tidak jauh berbeda akan tetapi petani sesudah menjadi anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan sebagian hasil panen yaitu seperempat dari hasil panen harus diserahkan ke perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan sebagai pemilik lahan pengelolaan kopi.

Struktur Biaya Transaksi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Seperti pengertian biaya transaksi yang dikemukakan oleh North (1990) dalam priyono (2004) adalah biaya untuk mengukur nilai atribut barang dan jasa yang dipertukarkan, biaya untuk melindungi hak atas barang, serta biaya untuk menetapkan kontrak/perjanjian dan biaya untuk menjalankan perjanjian. Pengertian lain, biaya transaksi adalah hal utama dalam penelitian tentang ekonomi, mengidentifikasi pentingnya dimensi pemerintah melalui transaksi dan menunjukkan bagaimana serta mengapa transaksi dapat dicocokkan dengan lembaga secara diskriminatif (William 1997).

Biaya transaksi dalam system tata kelola kelembagaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) berasal dari dua kelompok Perhutani dan Lembaga pemerintah. Biaya yang dikeluarkan ini menyesuaikan dengan anggaran yang dikeluarkan kelompok lembaga tersebut agar program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan Argopuro Lestari berjalan dengan baik. Jenis biaya transaksi yang dikeluarkan masing-masing kelompok lembaga yaitu biaya *setting* untuk awal pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan sepenuhnya di tanggung oleh petani kopi yang ingin bergabung di Lembaga Masyarakat Desa Hutan Argopuro Lestari., biaya informasi, dan biaya operasional ditanggung oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan, biaya yang di keluarkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk biaya informasi dan operasional di kelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan dari *bagi hasil* yang diperoleh. Total biaya transaksi tata kelola kelembagaan di Lembaga Masyarakat Desa Hutan Argopuro Lestari lembaga. Jenis biaya yang dikeluarkan antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan terdapat perbedaan karena setiap lembaga cakupan tanggung jawab dan masing-masing berbeda.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam usahatani kopi di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Kelembagaan pengelolaan kopi Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember juga melibatkan banyak pihak yaitu perhutani sebagai penyedia lahan , LMDH sebagai lembaga bentukan masyarakat desa hutan yang berfungsi penampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, petani sebagai pengelola lahan yang mengelola kopi dan hasilnya akan di bagi hasil. Besarnya *sharing* yang terjadi di lapangan yaitu 20% untuk Perhutani , 70% untuk petani dan 5% untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Pola kerjasama yang Desa Hutan Argopuro Lestari dengan Perhutani adalah dalam bentuk kegiatan pemanfaatan lahan dibawah tegakan sebagai lahan kawasan hutan produksi untuk masyarakat desa hutan. Dalam proses kerjasama antara Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Argopuro Lestari terdapat sinergisitas yang baik sehingga dapat membantu Perhutani dalam peningkatan kawasan hutan dan pendapatan bagi masyarakat semakin meningkat.
2. Pendapatan petani kopi sesudah menjadi anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan

dibandingkan sebelum menjadi anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan sangat berbeda. Rata-rata pendapatan yang diperoleh petani kopi sesudah menjadi anggota sebesar rata-rata total pendapatan Rp. 38.742.788 per hektar dalam satu tahun panen kopi nilai tersebut lebih besar daripada rata-rata pendapatan petani sebelum menjadi anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan sebesar Rp. 13.169.625.

3. Biaya transaksi pada kelembagaan di Desa Curahkalong antara Perhutani, Dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani harus memberikan sosialisasi secara baik dan benar agar semua pihak yang ikut terlibat dalam program dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan prosedur yang baik dan benar sehingga tercapainya kegiatan PHBM yang lebih maju.

REFERENCE

- Awang, S.A. 2000. Hutan Desa : Peluang Strategi dan Tantangan. Jurnal Hutan Rakyat Volume 3 (November). Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Awang, S.A. 2003. Politik Kehutanan Masyarakat. Center for Critical Social Studies. Yogyakarta.
- Budianti, S. 2011. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Hutan Terhadap Sistem PHBM di Perum Perhutani (Kasus di KPH Cianjur, Perum Perhutani Unit III, Jawa Barat. Skripsi (Tidak Diterbitkan). Departemen Manajemen Hutan IPB, Bogor.
- Carter, J. and Gronow, J. 2005. Recent Experience in Collaborative Management : A Review Paper. Center for International Forestry Research. Bogor.